

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN SITUS SEMEDO DESA SEMEDO KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

Muhammad Husnul Labib^{1*}, Bambang Tri Harsanto², Hikmah Nuraini³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*mhusnullabib@gmail.com

Abstrak

Industri pariwisata telah berkembang dengan pesat, serta melibatkan banyak aktor dalam usaha pengelolaan maupun pengembangannya. Kawasan Situs Semedo adalah salah satu situs purbakala yang terakhir ditemukan di Pulau Jawa. Keunikan dari situs ini adalah salah satu temuannya yang hanya ada satu satunya di Indonesia yaitu gajah kerdil *stegodon*. Adanya situs purbakala semedo di Desa Semedo merupakan modal atraksi bagi Desa Semedo untuk menjadi desa wisata. Oleh sebab itu masyarakat Desa Semedo dan Pemerintah Desa Semedo melakukan upaya untuk pengembangan kawasan Situs Semedo. tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan *Collaborative governance* dalam penguatan kelembagaan pengembangan kawasan Situs Semedo Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sebagai modal Desa Semedo menuju desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Informan penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Desa Semedo, aktivis Komunitas Peduli Situs Semedo, aktivis Kelompok Sadar Wisata Purba Desa Semedo, Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta Pengelola Museum Semedo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian pada sub aspek *face to face dialogue*, proses negosiasi, komitmen aktor dan proses konsensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan Situs Semedo dengan menggunakan pendekatan kolaborasi model Ansell dan Gash dengan sub aspek *face to face dialogue*, proses negosiasi, komitmen para aktor, dan proses konsensus. Pada proses *face to face dialogue* bahwa dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo telah terjadi proses tatap muka, namun proses tersebut hanya melibatkan aktor lokal, sedangkan komunikasi dengan aktor vertikal belum terjadi. Pada proses negosiasi terbentuk jaringan yang bersifat *self-governance* yang mana masing masing aktor memajemen mereka sendiri namun terlibat aktif dalam kolaborasi. Pada proses komitmen para aktor berkomitmen mendukung upaya pengembangan kawasan Situs Semedo namun hanya dalam hal pemenuhan tugas semata. Dan pada proses konsensus telah tercapai konsensus dalam pengembangan kawasan Situs Semedo namun muncul aktor dominan didalamnya. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo adalah antusiasme masyarakat yang tinggi serta adanya komunitas yang kreatif. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, komunikasi antar aktor yang tidak berjalan dengan baik, serta belum adanya regulasi tentang rintisan desa wisata.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Desa Wisata, Situs Semedo

Abstract

The tourism industry has developed rapidly, and involves many actors in its management and development efforts. The Semedo Site area is one of the last ancient sites discovered on the island of Java. The uniqueness of this site is one of the findings that there is only one in Indonesia, namely the *stegodon* pygmy elephant. The existence of the Semedo archaeological site in Semedo Village is an attraction capital for Semedo Village to become a tourist village. Therefore the Semedo Village community and the Semedo Village Government are making efforts to develop the Semedo Site area. The purpose of this study is to describe Collaborative governance in strengthening institutional development of the Semedo Site area, Semedo Village, Kedungbanteng District, Tegal Regency as the capital of Semedo Village towards a tourism village. This study used a qualitative method which was carried out in Semedo Village, Kedungbanteng District, Tegal Regency. The informants of this study were Semedo Village Government Officials, Semedo Site Care Community activists, Ancient Tourism Awareness Group activists in Semedo Village, Employees of the Youth Sports and Tourism Office and Employees of the Tegal Regency Education and Culture Office and the Semedo Museum Manager. Data collection is done by interviews, observation and documentation. The focus of

research on sub-aspects of face to face dialogueue, negotiation processes, actor commitment and consensus processes. The results of the study show that collaborative governance in the development of the Semedo Site area uses the collaborative approach of the Ansell and Gash models with the sub-aspects of face to face dialogueue, negotiation processes, commitment of actors, and consensus processes. In the face to face dialogueue process that in the effort to develop the Semedo Site area there has been a face to face process, but this process only involved local actors, while communication with vertical actors has not taken place. In the negotiation process a self-governance network is formed in which each actor manages their own but is actively involved in collaboration. In the commitment process, the actors are committed to supporting efforts to develop the Semedo Site area, but only in terms of fulfilling their duties. And in the consensus process a consensus was reached in the development of the Semedo Site area but a dominant actor appeared in it. Supporting factors in the effort to develop the Semedo Site area are the high enthusiasm of the community and the existence of a creative community. As for the inhibiting factors, there are limited budgets, communication between actors that is not going well, and the absence of regulations regarding pilot tourism villages.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism Village, Semedo Site

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat semakin mendesak di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab memerlukan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Pendekatan berbasis masyarakat memungkinkan komunitas setempat menjadi mitra dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya wisata dengan bijaksana, menjaga keaslian budaya dan lingkungan, serta memperoleh manfaat ekonomi yang adil. Selain itu, melibatkan masyarakat lokal membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara wisatawan dan tuan rumah, menciptakan pengalaman yang otentik dan unik bagi para pengunjung. Oleh karena itu, penerapan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berpusat pada masyarakat adalah penting untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dalam sektor pariwisata (Ashworth & Page, 2011).

Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Tegal yang sedang dikembangkan untuk menjadi obyek wisata yang potensial untuk dikunjungi adalah Situs Purbakala Semedo. Secara administratif situs ini terletak di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng. Situs Mengutip dari database Balai Arkeologi Yogyakarta dan BPSMP Sangiran, secara kualitas, temuan fosil vertebrata di Situs Semedo teridentifikasi 14 famili (keluarga) antara lain: Jenis *Mastodon*, *Stegodon*, *Elephas* (gajah purba), *Bovidae* (sejenis Banteng, kerbau), *Cervidae* (sejenis rusa), *Suidae* (babi), *Rhinocerotidae* (badak), *Hippopotamidae* (kuda sungai), *Felidae* (sejenis kucing, harimau), *Canidae* (Srigala, dll), *Hyaenidae* (heina), *Crocodylidae* (jenis buaya), *Testudinidae*, *Cheloniidae* (jenis kura-kura), *Lamnidae* (ikan hiu). Sementara Jejak budaya di Situs Semedo mulai ditemukan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Artefak yang ditemukan terdiri dari alat masif sebesar genggam tangan dan alat non-masif berukuran kecil. Jenis alat batu Situs Semedo adalah kapak perimbas (*chopper*), kapak penetak (*chopping*), kapak genggam (*hand-axe*), batu inti (*core*), bola batu berfaset (*polyhedral*), serta serpih (*flake*), serut (*scraper*) (Nugraha & Widiyanta, 2021).

Tabel 1. Kunjungan ke Situs Semedo 2014 – 2019

Tahun	Pengunjung	
	Pelajar	Jumlah Umum

2014	1500	84	1584
2015	1620	103	1723
2016	1050	71	1121
2017	1200	157	1357
2018	1470	193	1663
2019	1225	187	1412

Sumber: Pondok Informasi Situs Semedo (diolah)

Melihat antusiasme kunjungan di atas menempatkan Situs Semedo menjadi salah satu modal untuk pengembangan kawasan wisata. Potensi pariwisata pada kawasan Situs Semedo didukung beberapa daya tarik budaya lainnya seperti makam kuno, produk budaya tari sintren, dan pemandangan alam perbukitan serayu selatan. Dalam aspek sumber daya, pemerintah Kabupaten Tegal dapat menjadikan kawasan Situs Purbakala Semedo sebagai daerah strategis dengan memberdayakan potensi yang ada. Adanya situs purbakala semedo dan kehadiran Museum Semedo juga menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Desa Semedo sebagai modal Desa Semedo menuju desa wisata (Izza, 2019).

Namun demikian pengembangan kawasan Situs Semedo nampak berjalan ditempat. Peran pokdarwis sebagai motor penggerak kepariwisataan dinilai belum memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan kawasan situs semedo. Isu pengelolaan internal di dalam pokdarwis mengakibatkan banyaknya anggota yang tidak aktif bahkan mengundurkan diri. Selain itu program kerja pokdarwis kebanyakan merupakan program sosial yang mana mengakibatkan banyak anggota lebih mengutamakan pekerjaan utama mereka karena kurang menghasilkan *profit* untuk mereka. Kondisi masyarakat yang terkotak-kotak akibat perbedaan politik juga mengakibatkan keterlibatan masyarakat dalam pokdarwis.

Persoalan di atas menunjukkan pengembangan sumber daya Situs Semedo bukan merupakan pekerjaan sederhana dan mudah. Pengelolaan sumberdaya Situs Semedo tidak terbatas pada pelindungan artefak dan lingkungan situs semata, namun beragam kepentingan terhadap eksistensi Situs Semedo. Selain itu juga perlu mengelola atau menjembatani persinggungan, perbedaan kepentingan serta munculnya konflik antar *stakeholder* yang mana masing-masing memiliki perbedaan pengaruh / kekuatan dan sumberdaya yang dimiliki. Dengan demikian dalam proses pengelolaan serta menguraikan permasalahan yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata Situs Semedo, perlu adanya sinergitas antar pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sinergitas tersebut dapat diwujudkan dalam suatu kolaborasi yang ditempatkan dalam suatu wadah untuk mencapai kesamaan pandangan dan sebuah konsensus untuk menguraikan permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya Situs Semedo. Dengan demikian untuk menyamakan pandangan, maka diperlukan *collaborative covernance*. Sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Adanya kerangka kerja institusi yang jelas dan terstruktur, berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. (Smith, 2015; UNWTO, 2012). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian penguatan kelembagaan yang dilakukan secara kolaborasi dalam pengembangan kawasan situs semedo, untuk menggali informasi lebih dalam tentang bagaimana penguatan kelembagaan dalam pengembangan kawasan situs semedo, faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukungnya. Sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk peningkatan dan perbaikan dalam pengembangan kawasan situs semedo. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang proses kolaborasi anatar aktor dalam pengembangan kawasan situs semedo.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset. pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan secara khusus, *collaborative gvernance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral. Menurut Schrage (dalam Harley & Bisman, 2010:18), kolaborasi ialah upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Dari pengertian kolaborasi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*.

Proses dari suatu kolaborasi dilkakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ansell dan Gash (2008) sebagai berikut, 1) *Face to Face Dialogue*, Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. 2) *Trust building*, Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memnag bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. 3) *Commitment to process*, komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. 4) *Share Understanding*, Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. 5) *Intermediate outcomes*, Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relatif konkrit dan ketika "small wins" dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

2. Desa Wisata

Menurut Sastrayudha (2010) pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Wahab dalam Nyoman, (2006: 32) menjelaskan bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor

produktif lainnya. Sementara itu Nuryati (1993) menerangkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, selain itu diharapkan pula agar masyarakat memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Sastrayudha (2010) pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka

Sementara itu Yoeti (2010:6) dalam membentuk industri pariwisata setidaknya ada 3 unsur yaitu: 1) Akses menuju tempat wisata, yaitu penyediaan akses atau prasarana yang mudah dalam menuju objek wisata. 2) Fasilitas yang disediakan di objek wisata, fasilitas yang tersedia demi memberikan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati objek pariwisata 3) Atraksi di objek wisata, atraksi yang dipertunjukkan untuk menarik wisatawan agar mau berkunjung ke objek tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Sasaran dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Semedo, Ketua Kelompok Sadar Wisata Purba Desa Semedo, Ketua Komunitas Peduli Situs Semedo, Pengelola Museum Semedo, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, serta tokoh masyarakat Desa Semedo sebagai sasaran pendukung. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Semedo, Ketua Kelompok Sadar Wisata Purba Desa Semedo, Ketua Komunitas Peduli Situs Semedo, Pengelola Museum Semedo, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, serta tokoh masyarakat Desa Semedo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian pada sub aspek *face to face dialogue*, proses negosiasi, komitmen aktor dan proses konsensus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi proses *face to face dialogue*

Dialog tatap muka senantiasa sarat akan komunikasi verbal. Hakikat dari dialog tatap muka dalam membangun kolaborasi adalah menciptakan ruang interaktif yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berbagi gagasan, dan bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Semua bentuk tata kelola kolaboratif didasarkan pada dialog tatap muka langsung dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Seperti halnya tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada proses, dialog langsung sangat penting untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama.

Eki Ketua Pokdarwis Purba Desa semedo menerangkan bahwa telah ada satu forum pembicaraan dengan pemangku kepentingan di desa dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo yang diinisiasi oleh Pemkesos yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (wawancara 7 Agustus 2023). Eri sekretaris Desa Semedo menjelaskan bahwa adanya forum diskusi yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Tegal bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial (Pemkesos) yang mana dihadiri oleh seluruh perangkat desa, elemen masyarakat, komunitas dan pondok informasi situs purbakala semedo. Dari pertemuan itu menghasilkan pokdarwis (wawancara 7 Agustus 2023). Sisworo Ketua Komunitas Peduli Situs Semedo juga

membenarkan adanya pertemuan antar pemangku kepentingan di Situs Semedo. Namun dia menekankan bahwa jika pertemuan itu hanya di wilayah tingkatan desa, sedangkan untuk pertemuan forum secara keseluruhan belum ada. Disamping itu Sisworo juga menyampaikan bahwa komunitasnya telah melakukan kerjasama dengan pihak museum berkaitan dengan paket wisata dan pelatihan budaya (wawancara 7 Agustus 2023). Duman sebagai tokoh masyarakat dan pelopor Situs Semedo juga menerangkan bahwa sudah ada pertemuan di awal namun untuk kelanjutannya belum ada pertemuan lagi (wawancara 4 Agustus 2023). Sementara itu Joko selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal menerangkan bahwa pihaknya belum membuka forum komunikasi dengan pemangku kepentingan pariwisata di Desa Semedo, dia mengungkapkan bahwa pihaknya lebih mengandalkan pokdarwis untuk menggali potensi pariwisata yang ada di Desa Semedo karena konsep kepariwisataan yang ada di Desa semedo adalah budaya (7 Agustus 2023). Disisi lain Pambayun selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal lebih mejelaskan bahwa komunikasi yang dibangun saat ini adalah kmunikasi anantara tataran pemerintah daerah dan pusat untuk pembahasan kelanjutan kesepakatan pengelolaan bersama (wawancara 8 Agustus 2023). Dede selaku asisten humas dan pemasaran museum semedo juga menerangkan bahwa untuk forum komunikasi khusus belum diadakan. Hal tersebut dikarenakan museum baru saja melakukan reorganisasi di internal mereka. Pihak museum melakukan penataan internal terlebih dahulu baru akan berencana keluar (wawancara 9, Agustus 2023). Sejalan dengan pernyataan Dede, Bhekti Selaku edukator lingkungan museum semedo juga menerangkan bahwa pihak museum belum membuat forum komunikasi dengan masyarakat lokal, namun dia menekankan bahwa pihak museum terbuka kepada komunitas jika ingin melakukan kegiatan dan melibatkan museum (wawancara 10 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa telah terdapat dialog tatap muka antar aktor, namun demikian masih di tataran tingkat desa, sementara itu dialog tatap muka dengan aktor vertikal belum terlaksana. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Situs Semedo telah terjadi dialog tatap muka (*face to facedialoge*) antara aktor- aktor yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan kawasasn Situs Semedo. Namun, dalam kegiatan tersebut hanya melibatkan aktor aktor pada tingkatan lokal saja. Sementara itu aktor pada tingkat vertikal (Dinas pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) belum melakukan dialog tatap muka dengan aktor di tingkat lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum tersusunnya pola dan mekanisme komunikasi yang baik dengan antara aktor di tingkatan lokal dan tingkatan vertikal. Hal tersebut dapat menyebabkan arus informasi adanya monopoli arus informasi dan berdampak pada ketidaktahuan di antara masing masing aktor pada setiap tingkatan. Ketidak tahuan informasi tersebut akan mengakibatkan miss komunikasi diantara mereka, terutama pada saat penyusunan maupun pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan di kawasan semedo.

Callahan, (2006:138) mekanisme akuntabilitas saat ini tidak lagi berorientasi pada aspek administratif atau birokratis, tetapi lebih menitikberatkan pada pihak-pihak yang terlibat dan norma-norma profesional. Dalam kerangka ini, implementasi memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan entitas lainnya, yang mana sering disebut sebagai jaringan administratif. Jaringan ini memiliki kekuatan yang signifikan ketika aliran informasi, transparansi, dan pemahaman berhasil diakses oleh semua pelaku yang terlibat, tanpa terkecuali.

Adanya monopoli akan informasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya yang dimiliki, aktor lokal dalam pengembangan kawasan semedo memiliki sumberdaya yang lebih terbatas dari pada aktor di tingkatan vertikal yang mana memiliki sumberdaya yang lebih besar dari pada aktor lokal. Jika jalinan komunikasi antara aktor lokal dan aktor pada tingkatan vertikal tidak segera dibangun, maka usaha dalam pengembangan kawasan semedo hanya akan berjalan ditempat saja, bahkan akan tenggelam karena keterbatasan sumber daya.

Ansell dan Gash (2008) mengingatkan bahwa jika beberapa *stakeholders* tidak memiliki kapasitas, organisasi, status atau sumberdaya untuk berpartisipasi pada tingkat yang setara

dengan *stakeholders* lainnya, maka proses *collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang kuat.

b. Identifikasi Proses Negosiasi

Negosiasi adalah proses penting dalam kolaborasi di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam hal tujuan, sumber daya, atau masalah-masalah lainnya. Negosiasi dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat, menciptakan kepercayaan, dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperhatikan dalam proses kolaboratif. Fase negosiasi merupakan proses tawar-menawar antar *stakeholders* untuk menentukan tujuan bersama demi mencapai hasil kebijakan yang *win-win solution*. Artinya bahwa semua pihak saling diuntungkan atau paling tidak ditemukan kesepakatan atau konsensus bersama untuk tidak merugikan satu dengan lainnya (Ansell & Gash, 2008).

Eky mengungkapkan bahwa dalam proses pembuatan kesepakatan telah diadakan diskusi terbuka untuk mendapatkan mufakat musyawarah. Selain itu juga diadakan diskusi terbuka untuk menyampaikan pendapat masing-masing pihak. Eky juga menjelaskan bahwa kesepakatan awal untuk pengembangan wisata di Semedo itu melalui inisiasi dari pemda, terdapat pendampingan dari Hidora, dan pada akhirnya dibentuk pokdarwis untuk mengelola kepariwisataan di Semedo (wawancara 7 Agustus 2023). Eri selaku sekretaris desa menjelaskan bahwa proses negosiasi sangat perlu dilakukan. Hal tersebut mengingat karakter masyarakat yang ingin tampil dan ingin diakui, namun demikian ia juga menjelaskan bahwa proses negosiasi juga dengan melihat tupoksi masing-masing aktor (wawancara 7 Agustus 2023). Sementara itu Sisworo menjelaskan bahwa proses negosiasi lebih kepada madadukan program kerja masing-masing pihak dan kemudian mensinkronkannya. Dia juga menjelaskan proses negosiasi dilakukan lewat perkumpulan ia juga menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pengelola museum dan komunitas yaitu melalui program *packed tour* di Semedo. (wawancara 7 Agustus 2023). Dede, Selaku Humas dan Pemasaran Museum Semedo. Ia mengatakan bahwa jika komunitas ingin melakukan kerjasama museum terbuka, namun untuk saat ini museum hanya baru bisa memfasilitasi tempat (wawancara 8 Agustus 2023). Sejalan dengan Bhekti selaku edukator lingkungan museum Semedo menerangkan bahwa untuk saat ini belum ada kesepakatan formal untuk jangka panjang antar museum dan komunitas. Kesepakatan yang terbentuk baru sebatas untuk even even tertentu (wawancara 9 Agustus 2023). Joko Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa belum mengadakan kesepakatan dengan pemerintah desa terkait pengembangan kawasan Situs Semedo. Hal ini dikarenakan kawasan Situs Semedo baru masuk ke dalam agenda tambahan kegiatan pariwisata (wawancara 7 Agustus 2023). Sementara itu Pambayun, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa sudah terdapat kesepakatan dalam pengelolaan kawasan Semedo, namun hal tersebut adalah kesepakatan pada tingkat pemerintah daerah dan kementerian, yang mana pengelolaan museum dikelola oleh Kementerian sedangkan untuk lingkungan di luar museum dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk kesepakatan spesifik dengan pemerintah desa belum ada (wawancara 8 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara diambil beberapa poin. Pertama, dalam proses negosiasi dalam usaha pengembangan kawasan Situs Semedo dilakukan secara musyawarah. Kedua hal-hal yang dinegosiasikan merupakan gagasan atau program dari masing-masing aktor yang terlibat dan kemudian untuk disinkronkan. Ketiga pemerintah daerah belum melibatkan pemerintah desa secara aktif. Dari hasil tersebut terlihat bahwa proses negosiasi belum melibatkan seluruh aktor, hanya pada aktor di tingkat desa yang sudah terlibat. Proses negosiasi dalam pengembangan kawasan Situs Semedo dilakukan dalam konteks yang formal. Proses negosiasi yang formal dilakukan dengan media pertemuan musyawarah. Proses negosiasi ini lebih kearah pada pembahasan program kerja yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan Situs Semedo. Namun demikian proses negosiasi ini nampak hanya formalitas saja, karena pada awalnya setiap aktor yang terlibat telah membawa keputusan/ program kerjanya masing

masing dan kemudian hanya dipadukan saja. hal tersebut menandai jika tidak adanya entitas administratif dalam jaringan tersebut. Namun demikian setiap aktor berpartisipasi dalam jaringan tersebut.

DeSeve (Rachim, 2020) menjelaskan bahwa model jaringan *Self-governance* ditandai dengan dimana tidak entitas administratif dalam jaringan tersebut. semua aktor berperan berperan dalam jaringan tersebut sementara manajemennya dilakukan masing masing. Hal tersebut memiliki kekurangan yaitu akan sulit mencapai konsensus karena pengambilan keputusan terlalu terdesentralisir dan tidak efisien karena mengingat seringnya pertemuan yang diadakan. Erkuş-Öztürk dan Eraydin (2010) mengungkapkan pentingnya negoisasi akan membanguan kepercayaan dari masing masing aktor. Alipour et al. (2011) menjelaskan pentingnya nesosiasi untuk memahami isu-isu kebijakan dan peran institusi dalam mengembangkan mekanisme untuk menghadapi tantangan pendekatan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya.

c. Identifikasi Komitmen Para Aktor

Komitmen para aktor dalam berkolaborasi sangatlah penting karena berkolaborasi melibatkan dua atau lebih individu atau entitas yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen mencakup tekad, dedikasi, dan konsistensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati dalam kerangka kolaborasi.

Eky mengungkapkan bahwa komitmen pokdarwis adalah kunci dari pengembangan kawasan wisata semedo, ia mengungkapkan bahwa peran pokdarwis adalah sentral dan lembaga vertikal lain bersifat memfasilitasi. Ia juga menerangkan bahwa komitmen antar aktor yang terlibat bagus, namun untuk pembentukan kesepakatan yang benar benar formal belum dapat dilaksanakan (wawancara 7 Agustus 2023). Sementara itu dari pihak dinas Kepemudaan dan pariwisata juga mendukung penuh atas usaha pengembangan kawasan Situs Semedo. Dinas pariwisata sendiri telah membebaskan lahan untuk ketersediaan parkir pengunjung wisatatawan. Namun untuk komunikasi dengan museum belum dilakukan oleh dinas pariwisata Hal tersebut di jelaskan oleh joko kabid pariwisata. Pihaknya juga mngungkapkan bahwa selama ini melakukan pembinaan pokdarwis, dan menyediakan terminal namun ia akui juga belum ada perkembangan untuk pengelolaan parker (wawancara 7 Agustus 2023). Dukungan pengembangan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan membangun baliho baliho dan petunjuk arah, selain itu kontribusi dari dinsa pendidikan alah pembuatan pondok informasi sebelum adanya museum. Hal tersebut diungkapkan oleh Pambayun Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan (wawancara 8 Agustus 2023). Sementara itu dukungan dari pihak musium dijelaskan oleh dede selaku Asisten Humas dan pemesaran, bahwa pihaknya telah terbuka untuk mendukung kegiatan masyarakat untuk pengembangan kawasan Situs Semedo. Ia juga menjelaskan pihaknya telah bekerjasama dengan komunitas di beberapa even dalam usaha promosi dan pengembangan kawasan semedo (wawancara 9 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara dapat diambil poin bahwa para aktor yang terlibat langsung dalam usaha pengembangan kawasan semedo berkomitmen untuk mengembangkan kawasan semedo, meskipun dengan kekurangan yang ada, masing masing pihak telah melakukan perannya masing masing. Usaha Pemerintah daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah mendukung usaha pengembangan kawasan Situs Semedo. Di sisi lain baik Pokdarwis maupun Komunitas Peduli Situs Semedo (KPSS) telah berupaya mengembangkan kawasan Situs Semedo dengan sumberdaya mereka hasil sementara dari usaha mereka adalah adanya komitmen dengan pengelola museum untuk pelatihan budaya, serta eksisnya pasar langgeng sebagai salah satu penunjang kegiatan wisata maupun UMKM bagi masyarakat lokal. Disisi lain meskipun pengelola museum sedang fokus pada tahap penataan internal mereka, mereka memberikan kesempatan bagi komunitas untuk melakukan kegiatan yang memanfaatkan aset museum. Hal tersebut menandakan bahwa museum tidak acuh pada kondisi perkembangan lingkungan mereka.

Sururi (2018) menjelaskan bahwa komitmen itu meliputi proses dan hasil, keyakinan, pemahaman umum dan legitimasi internal/eksternal. Mafaza dan Setyowati (2020) mengungkapkan bahwa komitmen para aktor yang berkolaborasi adalah salah poin penting dalam berjalan dan berhasilnya kolaborasi. sementara Hanafi (2022) menjelaskan bahwa kepercayaan antar pihak terkait menjadi awal terbentuknya komitmen untuk melaksanakan kerjasama, dan dalam *collaborative governance* perlu kepemimpinan yang memimpin berjalannya proses kolaborasi.

d. Identifikasi proses konsensus

Konsensus dalam kolaborasi merujuk pada kesepakatan atau pemahaman bersama yang dicapai oleh semua pihak. Eky menjelaskan bahwa kesepakatan telah terbentuk dan tujuan utamanya pun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dia juga menerangkan bahwa kesepakatan Komunitas Peduli Situs Semedo (KPSS) sudah bekerjasama dengan pihak pengeliola museum(wawancara 7 Agustus 2022). Sisworo selaku ketua KPSS yang mana mngatakan bahwa sudah ada kesepakatan dengan musium, untuk keberlanjutan kerjasama itu melihat eksistensi dari KPSS (wawancara 7 agustus 2023). Eri Selaku Sekretaris Desa Semedo mengungkapkan bahwa segala keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, serta tidak ada aktor doninan dalam pengambilan keputusan (wawancara 7 Agustus 2023). Namun demikian terdapat sanggahan dari Eky yang mengatakan bahwa pemerintah desa melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan. Ia mengungkapkan bahwa untuk sementara seluruh fokus pengembangan wista di semedo ke makam kuno (wawancara 7 Agustus 2023). Sisworo, selaku ketua KPSS juga memberikan sanggahan. Ia menerangkan bahwa terdapat intervensi pada program kerja untuk pengembangan pasar (wawancara 7 Agustus 2023)

Dari identifikasi diatas diapatkan poin bahwa telah terjadi kesepakatan dalam upaya pengembangan kawasan Situs Semedo, namun terkait pengambilan keputusan masih terdapat intervensi dari pihak pemerintah desa. Dalam hal pengembangan kawasan Situs Semedo telah terjadi kesepakatan antara aktor yang terlibat. Kesepakatan dan pemahaman untuk pengembangan kawasan Situs Semedo telah terjalin terutama pokdarwis dan KPSS sebagai penggerak utama kegiatan kepariwisataan di kawasan semedo sebagai modal desa wisata. Namun demikian terdapat aktor dominan dalam pengambilan keputusan yaitu pemerintah desa. Hal tersebut ditandai dengan adanya intervensi dalam penentuan program pengembangan kawasan Situs Semedo. Sehingga proses mufakat dalam musyawarah tidak terbentuk.

Fisher dan Forester (2002) menunjukkan bagaimana dalam proses perencanaan suatu program kebijakan yang mengandalkan pola interaksi dan musyawarah yang membangun kesepakatan bersama dapat memberi implikasi dari berbagai posisi nilai dan mengembangkan tanggung jawab bersama dalam situasi konkret, serta menunjukkan arti penting adanya konflik di masyarakat. Praktik dominasi dalam pengambilan keputusan juga menjadi penghambat dari proses pemahaman dari masyarakat dalam menganalisa dan menetapkan kebutuhan mereka sendiri. Tak hanya itu, perubahan cara pandang dari berbagai kelompok masyarakat yang tidak dominan juga sulit untuk terwujud karena dengan proses dominasi tersebut, sebagian masyarakat hanya melaksanakan programseolah sebagai "formalitas".

Innes dan Booher (2003:33-59) melihat bahwa proses mufakat atau konsensus yang tercapai dengan tindakan komunikatif harus berada dalam kondisi dimana masingmasing aktor mampu menyadari adanya *interdependence of interest*, sebuah posisi kesalingtergantungan antar kepentingan yang dimiliki aktor. Tanpa kondisi tersebut, dominasi menjadi berpeluang terjadi. Maka oleh sebab itu para aktor harus memahami dan membuka realitas kebutuhan mereka akan praktik dominasi tersebut.

Dalam hal ini, untuk mengurangi dominasi aktor pengambilan keputusan, maka harus adanya pembagian peran dan tanggung jawab. Menetapkan peran dan tanggung jawab secara adil dan seimbang di antara semua aktor. Ini membantu mencegah dominasi yang disebabkan oleh penguasaan peran tertentu. Kemudian Mendorong semua aktor untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan proses kolaborasi. Ini membantu mencegah

satu aktor mengambil alih kendali. Melakukan evaluasi teratur terhadap dinamika kerja sama, termasuk untuk memeriksa adanya tanda-tanda dominasi salah satu aktor. Melibatkan pihak eksternal atau pihak ketiga independen dalam proses kolaborasi untuk memastikan bahwa dominasi tidak terjadi.

e. Identifikasi faktor penghambat dan kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya ada sesuatu yang mendukung dan memperlambat jalannya program tersebut. Eky menjelaskan dalam proses pengembangan kawasan Situs Semedo adalah semangat warga yang bersedia berpartisipasi walaupun belum keseluruhan. Hal itu menjadi salah satu faktor pendukung (wawancara 7 Agustus 2023). Sisworo juga mengungkapkan bahwa antusias masyarakat yang cukup besar terutama ketika ada *even even* (wawancara 7 Agustus 2023). Eri mengungkapkan bahwa kepedulian masyarakat dalam menata lingkungan dan antusiasme masyarakat yang besar menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan (wawancara 7 Agustus 2023). Disisi lain Joko Kabid Pariwisata menjelaskan bahwa atraksi, dan komunitas yang aktif melakukan penggalian budaya kearifan local wawancara (7 Agustus 2023). Sementara itu Bhekti mengungkapkan bahwa faktor pendukung lebih banyak datang dari pihak komunitas yang kreatif dalam mengembangkan kebudayaan lokal (wawancara 10 Agustus 2023).

Dari hasil keterangan tersebut didapatkan poin bahwa antusiasme masyarakat dan komunitas yang kreatif dalam mengembangkan potensi lokal menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan semedo. Adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap sektor pariwisata memiliki sejumlah kelebihan yang dapat memberikan dampak positif pada destinasi pariwisata. Antusiasme masyarakat terhadap pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya kunjungan wisatawan, bisnis dan industri terkait seperti akomodasi, restoran, dan kerajinan lokal dapat berkembang, menciptakan peluang pekerjaan dan penghasilan. alam usaha untuk menjaga daya tarik alam dan budaya, masyarakat akan lebih cenderung untuk menjadi penjaga lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Pariwisata yang sukses dapat memberikan peluang untuk mengembangkan identitas lokal yang kuat, menggambarkan keunikan dan ciri khas daerah tersebut. Antusiasme masyarakat yang besar dalam pariwisata dapat menjadi motor penggerak bagi perkembangan positif destinasi pariwisata, asalkan dikelola dengan bijak dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

Kehadiran komunitas lokal yang kreatif dalam pengembangan wisata desa memiliki sejumlah kelebihan yang dapat memberikan dampak positif pada pengalaman wisata dan pertumbuhan ekonomi lokal. komunitas lokal yang kreatif dapat menghadirkan pengalaman wisata yang unik dan berbeda dari destinasi lain. Ini menciptakan daya tarik khusus bagi wisatawan yang ingin merasakan budaya, seni, dan kehidupan lokal yang autentik. Komunitas lokal yang kreatif dapat memainkan peran penting dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal. Ini membantu masyarakat mempertahankan identitas mereka sambil berbagi warisan budaya dengan wisatawan. Keberadaan komunitas lokal yang kreatif dalam pengembangan wisata desa memberikan dimensi tambahan yang memperkaya pengalaman wisata, sambil memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Sementara itu kendala yang dialami, dalam pengembangan kawasan Situs Semedo berdasarkan penjelasan Bhekti adalah komunikasi yang kurang baik anatar pemangku kepentingan di semedo (wawancara 10 Agustus 2023). Kabid Kebudayaan, pambayun menjelaskan bahwa kendala yang terjadi adalah mindset masyarakat yang harus diubah agar lebih perhatian lagi dengan lingkungan. Selain itu antusias Masyarakat umum untuk datang ke museum juga perlu diedukasi (wawancara 8 Agustus 2023). Kabid Pariwisata, Joko Menjelaskan bahwa kendala yang terjadi adalah kualitas SDM selain itu juga anggaran untuk pengembangan (wawancara, 7 Agustus 2023). Dari pihak pelaku utama sendiri eky menjelaskan bahwa kendala yang ia alami selama proses pengembangan kawasan Situs Semedo adalah anggaran, partisipasi masyarakat, perhatian dari pemerintah yang kurang. Kemudian konsi masyarakat yang terkotak kotak dan peraturan rintisan desa wisata yang

belum diterbitkan (wawancara 7 Agustus 2023). Sisworo menjelaskan bahwa kendala yang dialami dalam pengembangan adalah logistik untuk pergerakan dan aturan mengenai rintisan desa wisata (wawancara 7 Agustus 2023).

Dari keterangan di atas didapatkan poin bahwa kendala yang dilami dalam pengembangan kawasan Situs Semedo adalah masalah anggaran, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, serta belum diterbitkannya regulasi tentang rintisan desa wisata. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan pariwisata dapat menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dengan bijaksana. dalam kasus pengembangan kawasan Situs Semedo, keterlibatan sektor bisnis/swasta belum dimaksimalkan. Pelibatan sektor bisnis/swasta ini dapat menjadi salah satu mengatasi minimnya anggaran dalam pengembangan kawasan Situs Semedo.

Belum adanya komunikasi inten antara aktor di level lokal dan vertikal menjadi salah satu problem dalam pengembangan kawasan Situs Semedo. Dalam hal ini baik aktor dalam tingkat lokal maupun ditingkat vertikal harus mulai membangun komunikasi agar penetapan program dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Tidak ada tumpang tindih program di antara aktor lokal maupun vertikal.

Adanya regulasi merupakan senjata utama dalam pelaksanaan kolaborasi. Dengan belum adanya regulasi maka tidak ada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Hal ini akan mengakibatkan akan adanya dominasi salah satu aktor. Para aktor ditingkat lokal khususnya agar dapat segera bermusyawarah dengan pemerintah desa, dengan hasil potensi pariwisata yang ada, serta regulasi-regulasi yang sudah ada untuk menunjang sebagai bahan diskusi agar segera menerbitkan regulasi tentang desa wisata.

KESIMPULAN

Proses *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan situs semedo secara keseluruhan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan: a) dalam proses *face to face dialogue* tidak semua aktor terlibatkan. Proses tersebut hanya melibatkan aktor di tingkat desa sementara Dinas Pendidikan dan Budaya serta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata belum membuka forum komunikasi dengan aktor di tingkat lokal. b) proses negoisasi dijalankan hanya bentuk formalitas, hal tersebut disebabkan karena masing masing aktor hanya memadukan program kerja yang telah disepakati masing masing kelompok. c) komitmen yang dilakukan aktor baru sebatas pemunahan tugas pokok dan fungsi masing masing. d) adanya aktor dominan dalam pengambilan keputusan dalam proses konsensus yang dilakukan.

Faktor yang mendukung proses kolaborasi dalam pengembangan kawasan Situs Semedo adalah antusiasme masyarakat yang tinggi dan adanya komunitas yang kreatif. Sedangkan kendala yang dialami adalah kurangnya anggaran dalam pengembangan kawasan Situs Semedo, Komunikasi yang belum terjalin dengan baik, serta regulasi yang belum diterbitkan.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapatkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan yang dapat direkomendasikan kepada pihak pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut: a) pada proses *face to face dialogue*, Pemerintah Desa untuk dapat menjadi inisiator dialog tatap muka (*face to face dialogue*) untuk aktor di tingkat lokal dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyatukan pemahaman dan komitmen dalam pengembangan kawasan Situs Semedo. b) Dalam proses negosiasi para aktor di tingkat lokal untuk dapat melakukan komunikasi dengan aktor di tingkat vertikal sehingga dapat menyamakan sudut pandang dan pemahaman dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan kawasan situs semedo sebagai modal untuk Desa Semedo menjadi desa wisata. c) Dalam komitmen para aktor, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan komunikasi lebih intens dengan aktor lokal, hal itu bisa dalam bentuk pendampingan. d) Dalam proses konsensus, para aktor untuk menyingkirkan ego sektoral dan perlu memahami bahwa dalam kolaborasi harus ada saling ketergantungan antar aktor satu dan yang lain sehingga tidak ada aktor dominan dalam pengambilan keputusan. e) Pemerintah

Desa, Pokdarwis dan Komunitas perlu melibatkan dan membuat kesepakatan dengan sektor bisnis untuk menanganai masalah anggran dalam pengembangan kawasan situs semedo sebagai modal untuk menjadi desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alipour, H., Kayaman, R., & Ligay, E. (2011). Governance as Catalyst to Sustainable Tourism Development: Evidence from North Cyprus. *Journal of Sustainable Development*, 4. <https://doi.org/10.5539/jsd.v4n5p32>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. *Tourism Management*, 32(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.02.002>
- Callahan, K. (2006). *Elements of effective governance: Measurement, accountability and participation*. CRC Press.
- Erkuş-Öztürk, H., & Eraydin, A. (2010). Environmental governance for sustainable tourism development: Collaborative networks and organisation building in the Antalya tourism region. *Tourism Management*, 31(1). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.01.002>
- Hanafi, M. (2022). Pengembangan Pariwisata Melalui Collaborative Governance Di Kabupaten Magelang. *Kajian Ilmu Administrasi*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i1.53447>
- Izza, F. Al. (2019). *IDENTIFIKASI POTENSI KAWASAN WISATA SITUS PURBAKALA SEMEDO DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7–12.
- Nugraha, S., & Widiyanta, W. (2021). Rancangan Pengelolaan Sumberdaya Budaya Situs Semedo “Suatu Kontribusi Pemikiran.” *Jurnal Sangiran*, 107–122. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/wpcontent/uploads/sites/11/2022/01/8-JurnalSangiran.pdf>
- Nuryati, W. (1993). Concept, Perspective, and Chalanges. In *Makalah bagian laporan dari konferensi internasional mengenai pariwisata budaya*. Gajahmada University Press.
- Rachim, R. S. A. H. W. A. (2020). *Pemerintahan Kolaboratif dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Tekan (ed.)). *Pemerintahan Kolaboratif dalam Perspektif Administrasi Publik @2020* Penulis : Retno Sunu Astuti Hardi Warsono Abd. Rachim Editor Tim DAP Tekan Perancang Sampul Fauzy Gustaman Penata Letak Tim DAP Press Cetakan pertama : Juni 2020 xv + 142 halaman + daftar.
- Sastrayudha, G. S. (2010). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata*. Sekretariat A4DE.
- Smith, M. K. (2015). Tourism and collaboration. In *Encyclopedia of Tourism*. Springer. https://doi.org/doi:10.1007/978-3-319-01669-6_87-1
- Sururi, A. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI INOVASI KEBIJAKAN STRATEGIS (STUDI REVITALISASI KAWASAN WISATA CAGAR BUDAYA BANTEN LAMA). *HUMANIKA*, 25(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- UNWTO. (2012). *Tourism and the Millennium Development Goals: A Global Report*.
- Yoeti, O. A. (2010). *Pemasaran Pariwisata*. Aksara.